

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada pertengahan tahun 2008 silam Indonesia bersitegang dengan negeri jiran Malaysia, berkaitan dengan permasalahan klaim budaya yaitu batik yang diakui Malaysia sebagai warisan budaya mereka. Sontak isu klaim batik sebagai budaya Malaysia tersebut menjadi topik hangat yang diperdebatkan oleh masyarakat Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya beberapa warisan budaya bangsa sebut saja keris, wayang kulit, hingga lagu rasa sayange pun menjadi sasaran klaim oleh bangsa lain.

Menurut Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga Surabaya (Unair) Aribowo, “adanya klaim budaya oleh Malaysia berawal dari komunitas (masyarakat Indonesia yang merantau ke Malaysia) Indonesia yang telah hidup di Malaysia selama bertahun-tahun, kendati telah menetap menjadi warga negara Malaysia akan tetapi tradisi yang diwarisi oleh leluhur mereka tetap mereka pertahankan. Hal ini yang menyebabkan batik, keris, wayang kulit hingga lagu rasa sayange dapat ditemukan dan masuk menjadi khazanah kebudayaan masyarakat Malaysia”¹.

Pernyataan bapak Aribowo diatas merupakan suatu pernyataan yang faktual, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa cukup banyak

masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai TKI di Malaysia setelah merasakan lingkungan dan penghasilan yang lebih besar disana mereka memilih untuk menjadi warga tetap di Malaysia. Para migran pun tentunya memiliki alasan tertentu yang menyebabkan mereka memilih menjadi warga negara asing. Beberapa alasannya menurut survey yang dilakukan adalah, sukar mendapat pekerjaan di Indonesia, dan ingin memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.²

Seiring dengan perkembangan batik di Malaysia, dinyatakan secara tidak langsung bahwa batik merupakan warisan budaya masyarakat mereka, melalui beberapa penampilan kebudayaan dan pariwisata di negara tersebut batik dicantumkan sebagai kebudayaan yang merupakan milik negara Malaysia, Klaim yang dilakukan oleh Malaysia tersebut memberikan kekhawatiran bagi bangsa Indonesia khususnya bagi pengrajin batik di Jawa. Mereka mengkhawatirkan akan adanya pembayaran royalti atas pembuatan batik yang mereka kreasikan sendiri suatu saat nanti dikarenakan batik telah diklaim oleh negara lain dan menjadi hak milik negara tersebut.

Batik sendiri merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang keberadaannya telah hadir sejak zaman kerajaan Jenggala, Airlangga³, Majapahit hingga kerajaan setelahnya. Dan menjadi pesat perkembangannya pada masa kerajaan Mataram, kerajaan Surakarta dan Yogyakarta⁴.

Tak pelak adanya klaim yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan. Pasalnya batik bagi

² Nasution Arif. M, *Orang Indonesia di Malaysia (Menjual Kemiskinan Membangun Identitas)*, Pustaka Pelajar, 2001, hal.56

³<http://internasional.kompas.com/read/2009/10/10/19462435/Batik.Indonesia.Batik.Malaysia.dan.Hari.Batik>, diunduh pada tanggal 29 April 2012, pukul 5:32

⁴<http://www.4mat.blogspot.com/2010/10/arsitektur-batik-indonesia.html>, Diunduh pada tanggal 29

masyarakat Indonesia tidak hanya sebagai sebuah media sandang belaka, lebih dari itu batik digunakan dalam kegiatan bisnis dan akademis, sementara itu berbagai macam corak batik dipakai dalam upacara pernikahan, kehamilan, juga dalam wayang, kebutuhan non-sandang dan berbagai penampilan kesenian, bahkan kain batik memainkan peran utama dalam ritual tertentu diberbagai provinsi di Indonesia.

Batik Indonesia mempunyai teknik dan simbol budaya yang menjadi identitas rakyat Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal, bayi-bayi digendong dengan kain batik bercorak simbol yang membawa keberuntungan, dan yang meninggal ditutup dengan kain batik khusus yang memiliki makna duka. Masyarakat Indonesia telah mengenakan batik sejak pertama kali batik diproduksi menjadi pakaian sehari-hari seperti daster, kaos oblong, celana dan rok batik hingga ke produk asesoris batik.

Munculnya permasalahan diatas membuat pemerintah Indonesia segera mengambil langkah untuk mengukuhkan batik sebagai warisan budaya indonesia kepada *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), terhitung sejak tanggal 15 Januari 2008 Indonesia sebagai negara yang mengajukan batik sebagai warisan budayanya, sesuai dengan aturan UNESCO tahun 2003⁵. Melalui proses yang panjang dan persyaratan yang telah dipenuhi maka batik pun ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Bagi Kemanusiaan (*The Intangible Cultural Heritage Of Humanity*) yang berasal dari Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009.

⁵ <http://www.antaraneews.com/berita/1252320992/unesco-setujui-batik-sebagai-warisan-budaya->

Akan tetapi apakah cukup sampai disitu perjuangan terhadap batik sebagai kebudayaan dunia? Tidak, batik yang sangat akrab dengan keseharian masyarakat Indonesia ternyata memiliki popularitas yang mendunia, jauh-jauh sebelum Indonesia mengalami permasalahan klaim budaya dengan negara tetangga, ternyata batik telah dikenal dengan luas oleh masyarakat diluar Indonesia, seperti Eropa dan Asia.

Batik menjadi sorotan khusus bagi para pakar seni, ilmuan serta sejarawan diberbagai negara, dan mereka menjadikan batik sebagai objek penelitian. Beberapa pengamat batik yang berasal dari berbagai penjuru dunia antara lain: Prof. Masakatsu Tozu dari Jepang, ia seorang akademisi, pengamat batik dan seni budaya Jawa, Rudolf G. Smend dari Jerman, ia seorang kolektor Batik, pengajar dan pemilik sebuah galeri, Dr. Fiona Kerlogue dari Inggris, seorang antropolog dan pengajar, Brigitte Wilach dari Jerman, seorang seniman Batik, kolektor dan seorang *global ambassador* dan Dr. Renske Heringa dari Belanda, seorang pengrajin, antropolog, kurator sebuah museum dan penerbit.

Tanpa kita sadari ternyata batik memiliki popularitas yang luas sekali cakupannya yang tidak lama lagi batik akan menjadi komoditi utama dalam permintaan pasar dunia. Dipandang dari segi ekonomi hal tersebut berarti mengindikasikan bahwa batik akan menjadi salah satu faktor dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja untuk dipekerjakan di sentra-sentra kerajinan batik di Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya popularitas batik didunia tersebut, bila kita lihat dari sisi lain ternyata batik memiliki potensi yang cukup besar jika dimanfaatkan dengan tepat sasaran oleh pemerintah. Yaitu manfaat batik

sebagai warisan budaya dunia sebagai alat diplomasi kebudayaan Indonesia dikancah internasional.

Bagi Indonesia batik merupakan warisan budaya bangsa yang telah diakui dimata internasional yang dapat mengambil sebuah peran yang signifikan. Salah satu dari potensi yang dimiliki batik adalah sebuah diplomasi kebudayaan yang dapat memberikan dampak positif bagi negara Indonesia dimata internasional. Batik yang memiliki penggemar diberbagai penjuru dunia dapat digunakan sebagai nilai tambah dan *bargaining position* bagi Indonesia.

Pemanfaatan batik sebagai sarana diplomasi memang akan sangat berguna bagi negara kita, karena kekuatan (*power*) yang dapat menghasilkan efektivitas yang besar dan dengan *cost* yang rendah adalah melalui cara *Soft Power* atau dengan sarana diplomasi budaya tersebut. *soft power* tidak perlu mengeluarkan dana yang besar dalam tujuannya mendapatkan kepentingan negara sekaligus menaikkan martabat bangsa. Untuk pembahasan diplomasi kebudayaan dengan lebih detailnya maka penulis akan menjelaskannya pada landasan teori penulisan pada bagian berikutnya.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya lanjutan oleh pemerintah Indonesia pasca ditetapkannya batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia pada 2 Oktober 2009 silam, upaya untuk menjadikan batik sebagai instrumen diplomasi kebudayaan bagi negara. Dan penulis yakin akan latar belakang masalah yang terjadi sebagai landasan diadakannya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan baru bagi kita untuk senantiasa mendukung batik baik dari segi perkembangannya maupun pelestarian batik

B. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Menjelaskan usaha pemerintah Indonesia dalam upaya pelestarian budaya batik sebagai warisan budaya bangsa tak benda bagi kemanusiaan (*the intangible cultural heritage of humanity*)
- 2) Mencoba menjelaskan bagaimana batik dapat menjadi kekuatan diplomatik bagi Indonesia di kancah internasional pasca ditetapkannya batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia sejak 2 Oktober 2009.
- 3) Penulis berharap dapat memberikan sumbangsih berupa karya ilmiah yang berguna bagi para pelajar dan masyarakat guna menyebarkan pentingnya batik sebagai budaya bangsa.
- 4) Untuk menjawab pokok dari permasalahan yang diangkat dan sekaligus dapat membuktikan hipotesa.
- 5) Dan ditujukan juga untuk mengaplikasikan teori semasa kuliah dan sebagai persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan strata satu Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. KAJIAN PUSTAKA

Dalam penulisan skripsi yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat yaitu batik, penulis mencoba memberikan sebuah kajian lebih lanjut lagi berkaitan dengan adanya penulisan skripsi terdahulu yang mengangkat dengan tema yang sejenis, akan tetapi penulis mencoba mengkaji perbedaan

pembahasan dan fokus permasalahan yang dibahas untuk menghindari adanya duplikasi atau penulisan karya yang serupa.

Judul skripsi adalah "*Latar Belakang Upaya Indonesia Mendapat Pengakuan UNESCO Atas Batik Indonesia Sebagai Warisan Budaya Dunia*" dalam skripsinya yang ditulis saudari Miliana Ragil S seorang Mahasiswi UMY angkatan 2005 tersebut mengambil tema batik dengan menekankan pada apa (*what*) usaha pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO pada warisan budaya Indonesia yaitu batik, penekanan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah apakah upaya-upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Jadi lebih jauh lagi saudari Miliana memaparkan upaya pemerintah dalam memperjuangkan batik agar menjadi milik Indonesia, yang pada saat itu masih terjadi perdebatan klaim antara Indonesia dan Malaysia.

Adapun hipotesa atau kesimpulan sementara yang menjadi kesimpulan akhir dari permasalahan yang dibahas oleh skripsi tersebut adalah bahwa adanya potensi ekonomi yang dapat menjadi daya saing bagi negara Indonesia oleh negara-negara lain yang tentunya akan memberikan keuntungan bagi Indonesia yang merupakan salah satu motif dibalik usaha pemerintah untuk mendapat pengakuan dari UNESCO tersebut.

Berdasarkan dengan kajian pustaka diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak ada kesamaan antara skripsi yang ditulis dengan skripsi terdahulu yang mengambil tema yang sama yaitu batik oleh saudari Miliana karena pokok pembahasan dan permasalahan yang dikaji jelas berbeda

yang menekankan pada latar belakang bagaimana untuk mendapat pengakuan UNESCO, sedangkan penulis mencoba mengangkat tentang permasalahan dengan penekanan pada pertanyaan (*how*) bagaimana, yaitu bagaimana pemerintah Indonesia menjadikan batik sebagai sarana diplomasi kebudayaan, dan sebagai *soft power* bagi Indonesia. Dan pembahasan masalah atau pokok inti permasalahannya pun berbeda, karena saudari Miliana membahas permasalahan berupa upaya pemerintah untuk mendapat pengakuan batik dimata internasional yang pada saat itu belum diakui oleh UNESCO. Tetapi pembahasan yang diangkat oleh penulis adalah tentang kondisi dimana batik telah diakui oleh UNESCO dan bagaimana agar batik dapat menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar komoditi (bidang ekonomi saja), melainkan sebagai sarana *soft power* dan diplomasi kebudayaan bagi Indonesia.

D. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian panjang diatas, maka penulis mengajukan sebuah pokok permasalahan sebagai berikut: *Pasca ditetapkannya batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia tak benda bagi kemanusiaan (The Intangible Cultural Heritage of Humanity), maka bagaimana upaya pemerintah dalam menjadikan batik sebagai sarana diplomasi & soft power bagi Indonesia?*

E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Melihat pentingnya sebuah teori dalam sebuah karya penulisan didalam skripsi untuk menjelaskan sebuah studi kasus dan masalah, maka penulis telah memilihkan teori untuk menjelaskan tema yang diangkat. Teori yang digunakan

adalah, teori sistem politik (*political action*) dan konsep diplomasi kebudayaan/*soft power*.

1. Konsep Diplomasi Kebudayaan & *Soft Power*

“Diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha negara dalam upaya untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, termasuk didalamnya adalah pemanfaatan ideologi, teknologi, politik, ekonomi militer, sosial, kesenian dll dalam percaturan masyarakat internasional”⁶.

Melalui diplomasi kebudayaan diharapkan negara dapat mengandalkan *soft power* dengan media kekayaan budayanya, yang dalam tujuannya adalah mendapat pengakuan dunia internasional. Diplomasi kebudayaan dapat pula dimasukkan dalam kategori *intangible power*, yang artinya adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa diraba, yang juga turut andil dalam memajukan perkembangan negaranya. “*intangible power ingredients- National image, public support, leadership- may be as important as the tangible elements.*”⁷ yang mungkin menjadi harapan dan misi pemerintah Indonesia dalam menjadikan batik sebagai sarana kekuatan bagi Indonesia baik dari sisi ekonomi maupun politik.

Diplomasi kebudayaan dalam hubungan internasional mengandalkan sebuah kekuatan selain militer untuk mendapatkan tujuannya, atau dengan kata lain *getting others to want the outcome that you want.*⁸ Atau bisa dijabarkan dengan, sebuah negara akan mampu mendapatkan kepentingannya di

⁶ Warsito Tulus, Wahyuni Kartika Sari, *Diplomasi Kebudayaan (Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang, Studi Kasus Indonesia)* Ombak Tulus, Yogyakarta, 2007. Hal. 4

percaturan politik internasional karena negara lain memang menghendaknya atau ingin melakukannya. Tidak menggunakan unsur *coercion & force* atau paksaan seperti yang diterapkan dalam konsep *hard power* maka sebaliknya *soft power* menggunakan unsur ketertarikan atau keterpikatan.

Bagaimanakah batik dapat menjadi sarana diplomasi kebudayaan bagi Indonesia? pertanyaan tersebut adalah pertanyaan besar yang utama yang menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk merealisasikannya, menjadikan batik sebagai sarana yang memiliki dampak signifikan bagi diplomasi Indonesia.

Diplomasi kebudayaan tidak hanya menunjuk pada penggunaan kebudayaan sebagai sarana untuk memperjuangkan kebijakan politik luar negeri suatu negara, akan tetapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas yang secara umum disebut kepentingan nasional⁹, berdasarkan tulisan dari kedua ilmuan tersebut maka batik dalam upayanya menjadi sarana diplomasi amatlah berpotensi sekali. Banyak keuntungan yang bisa dimaksimalkan dengan menggunakan batik sebagai multisarana selain sebagai barang komoditi ekspor ekonomi saja.

Melalui batik maka penguatan citra positif terhadap bangsa akan meningkat dan akan mempengaruhi proses kerjasama antar negara. Contoh kasus yang dapat kita ambil dalam diplomasi menggunakan batik adalah, seperti yang digunakan oleh rezim Soeharto dalam memanfaatkan batik pada KTT APEC November 1994 di Bogor, Jawa Barat, ketika Soeharto atas

⁹ Warsito Tulus, Wahyuni Kartika Sari, *Diplomasi Kebudayaan (Konsep dan Relevansi Bagi*

bantuan rancangan Iwan Tirta, memaksa 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari kumpulan negara-negara APEC, memakai batik tulis yang khusus di buat dengan corak yang melambang simbol negara masing-masing dengan sentuhan etnis Jawa, termasuk Presiden AS Bill Clinton.

Hal tersebut bukanlah tanpa maksud tertentu, akan tetapi didalam diplomasi kebudayaan kita dapat mengerti bahwa tindakan yang dilakukan oleh presiden Soeharto tersebut adalah sebuah pencitraan positif untuk mengenalkan budaya batik ke dunia internasional. Hal itu terbukti memberikan dampak positif bagi Indonesia karena sejak saat itulah pada setiap pelaksanaan APEC maka akan dilakukan sesi foto bersama dengan seragam kebudayaan negara tuan rumah konferensi tersebut.

Dengan menggunakan sarana batik Indonesia semakin menancapkan *imagined values* yang berfungsi menyampaikan pesan tertentu kedalam pikiran setiap individu. Dengan nilai-nilai tersebut mereka menjadi pendukung dan berusaha mempertahankan kebudayaan Indonesia, kendati mereka berada di luar lingkungan Indonesia¹⁰. sebagaimana yang kita ketahui bahwa batik telah mendunia tanpa kita sadari atau tidak, penggemar batik telah mencapai negara-negara Asia, hingga Eropa yang meliputi berbagai macam spesialisasi, yaitu kelompok peneliti sejarah dan kebudayaan, pengamat seni, seniman, kolektor dan juga doktor-doktor yang bergerak dibidang seni. Hal ini dapat menjadi pendukung utama dalam melanggengkan diplomasi batik ini sendiri, melalui aktor-aktor tersebut Indonesia dapat dengan mudah memberikan stigma positif

dibidang kebudayaan yang dampaknya kompleks meliputi sosial, ekonomi dan politik.

Oleh karena itu dengan menggunakan teori dan konsep tentang diplomasi kebudayaan dan dengan melihat ketiga agenda diatas maka, kita sedikitnya telah mengetahui sebagian kecil langkah konkrit yang diambil pemerintah dalam usahanya menjadikan batik sebagai sebuah komoditi yang bukan hanya sekedar agar dapat memberikan *feed back* positif pada ranah ekonomi saja, akan tetapi lebih jauh, pemerintah berusaha menjadikan batik sebagai senjata andalan baru untuk menunjukkan taring Indonesia dalam ranah kebudayaan kedunia internasional.

Selanjutnya adalah konsep *soft power*, mengutip nasihat Rousseau dia mengatakan, "*The strongest is never strong enough always to be master unless he transforms strength into right and obedience into duty*"¹¹. Yang maksudnya kurang lebih adalah, yang terkuat tidaklah cukup kuat apabila kecuali jika dia mentransformasikan kekuatannya kepada kebaikan, atau bisa kita simpulkan disini adalah sebuah transformasi dari cara *hard power* menuju kearah *soft power*.

Joseph nye pun menyatakan hal yang senada dalam tulisannya *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, bahwa Perancis menyebarkan pengaruhnya melalui bahasanya, *Take France for example. In the 17th and 18th centuries, France promoted its culture throughout Europe. French not only became the language of diplomacy, but was even used at some foreign courts such as Prussia and Russia. During the French Revolution, France sought to*

*appeal over the heads of governments directly to foreign populations by promoting its revolutionary ideology*¹². Hal tersebut diatas meyakinkan kita akan pengaruh sebuah nilai dari *soft power* itu sendiri. Dalam hal ini *soft power* merupakan cara suatu negara dalam mendapatkan *national interest* dengan menggunakan cara yang baik. Budaya sebagai instrumennya adalah upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yang merupakan langkah untuk memperluas pengaruh Indonesia dimata dunia.

2. Teori Sistem Politik (*Political Action*)

Teori sistem politik merupakan teori yang dikembangkan oleh David Easton yang merupakan rangkaian dari sebuah sistem politik disuatu negara dari mulai adanya tuntutan, pengolahan sebuah *demand* hingga menjadi hasil atau kebijakan yang berupaya hasil dari pengambilan keputusan pemerintah.

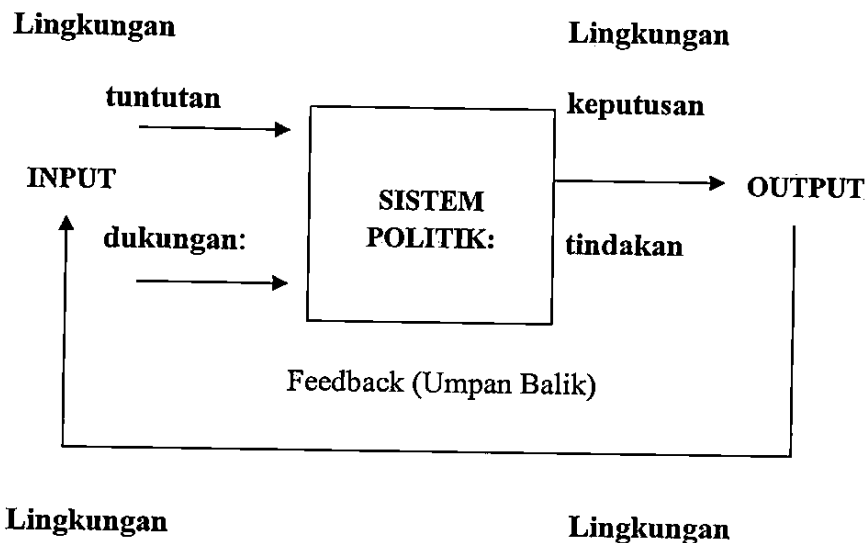
Sistem politik menurut Easton adalah tindakan politik (*political actions*) yaitu berupa kondisi seperti pembuatan undang-undang, yang merupakan tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, penjelasan detailnya akan dibahas pada bab ketiga.

Untuk sedikit memperjelas maka penulis melampirkan gambar skema awal dari teori sistem politik oleh David Easton. Dibawah ini ilustrasi sistem politik adalah bentuk asli sebelum penulis mencocokkannya dengan kasus yang diangkat yaitu batik.

¹² J. S. Nye, Jr. & D. R. Kruman, *The New American Superpower in World Politics*, Chapter 4, *Wielding*

Gambar 1.1

Skema sistem politik David Easton



Sumber: Ronald H. Chilcote¹³

Dalam ilustrasi skema awal diatas kita dapat melihat bentuk sebuah alur sistem politik yang masih sangat sederhana, dalam gambar diatas pula penulis belum memasukkan permasalahan yang diangkat yaitu batik sebagai pengaplikasian teorinya. Hal tersebut akan lebih detail dijabarkan pada penjelasan selanjutnya.

Berdasarkan oleh gambar 1.1 diatas, maka kita dapat menemukan istilah-istilah yang mungkin kurang akrab ditelinga kita, ataupun bahkan kita belum pernah mengenal sama sekali. Oleh karena itu penulis mengajak untuk lebih memahami lebih dalam istilah diatas sebelum berlanjut pada pembahasan

¹³ Ronald H. Chilcote, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*, (Colorado: Westview Press, 1981) hal. 145-82.

yang lebih jauh lagi. Makna dari istilah-istilah diatas antara lain sebagai berikut:

a) *Input*

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. *Input* yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa *tuntutan* dan *dukungan*. Tuntutan secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Sedangkan dukungan secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan.

Tuntutan adalah *raw material* atau bahan mentah yang kemudian diolah sistem politik menjadi keputusan. Tuntutan diciptakan oleh individu maupun kelompok yang memainkan peran tertentu di dalam sistem politik (struktur input). Tuntutan sifatnya beragam dan setiap tuntutan punya dampak yang berbeda atas sistem politik. Contoh dari tuntutan antara lain adalah:

1. Tuntutan atas komoditas dan pelayanan, misalnya jaminan sosial, kelancaran bertransportasi, kesempatan menikmati pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan saluran irigasi, ataupun pelayanan birokrasi negara yang tidak berbelit. *Konversi* atas tuntutan ini berupa *artikulasi kepentingan (atau tuntutan)*.
2. Tuntutan yang sifatnya simbolik meliputi penjelasan pejabat pemerintah atas suatu kebijakan, keberhasilan sistem politik mengatasi masalah, upaya menghargai simbol-simbol negara (lagu kebangsaan, lambang), ataupun upacara-upacara hari besar nasional. *Konversi* atas tuntutan jenis ini misalnya dibuatnya ketentuan umum yang mengatur

implementasi setiap tuntutan yang sifatnya simbolik. *Output* yang sifatnya simbolik termasuk penegasan sistem politik atas simbol-simbol negara, penegasan nilai-nilai yang dianut (di Indonesia adalah Pancasila), serta penjelasan rutin dari pejabat negara atas isu-isu yang kontroversial dan menyita perhatian publik.

Dalam realisasinya dan konversi kebijakan kedalam tema batik maka penulis akan menjabarkannya pada penjelasan berikutnya yang telah diadopsi dari konsep sistem politik David Easton diatas.

Jika tuntutan adalah ‘bahan mentah’ untuk memproduksi keputusan-keputusan politik, maka dukungan berkisar pada upaya mempertahankan atau menolak keberlakuan sebuah sistem politik. Tanpa sebuah dukungan, sistem politik kehilangan legitimasi dan otoritasnya. Dukungan itu sendiri terdiri atas:

1. Dukungan material warganegara bisa berupa kemauan membayar pajak atau peran aktif mereka dalam program-program yang dicanangkan pemerintah (misalnya program kebersihan lingkungan, penanaman sejuta pohon). *Konversi* dukungan ini adalah *ajudikasi peraturan di tingkat individu* yaitu upaya penerapan sanksi bagi yang tidak menurut pada program pemerintah serta kemampuan simbolik pemerintah untuk melakukan himbuan agar publik tertarik memberi dukungan pada pemerintah.
2. Dukungan untuk taat pada hukum serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. *Konversi* dukungan ini berupa *nontransmision*

informasi yang berkaitan dengan ketaatan warganegara pada hukum di sekujur struktur sistem politik, antar sistem politik.

3. Dukungan dalam bentuk tindakan untuk mempertahankan otoritas publik, upacara, serta simbol-simbol negara. Misalnya mengamalkan Pancasila, menyayangi sarana-sarana publik, mencintai budaya yang merupakan warisan bangsa, menentang penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain, mencuci bendera merah putih yang terkotori debu dan hujan asam, mensosialisasikan peran vital Pancasila dalam mengikat integrasi nasional Indonesia.

b) *Output*

Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai *output*, *Output* ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan *feedback* (umpan balik) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam siklusnya.

Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. *Output* terbagi dua yaitu *keputusan* dan *tindakan* yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, Tindakan adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat¹⁴. Keputusan yang dilakukan pemerintah bisa

berupa kebijakan yang berupa undang-undang maupun agenda kerja pemerintah. Sedangkan tindakan pemerintah adalah pelaksanaan dari agenda kerja pemerintah guna mensukseskan keputusan yang telah diambil.

c) Sistem Politik

Dalam skema diatas, Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan karena menurut Easton, sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang *legitimate* (otoritatif) di mata warganegara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*) yang disebut kebijakan (*policy*) guna mengalokasikan nilai. Unit-unit ini seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya dan didalam unit-unit tersebut menurut Easton terdapat sebuah "tindakan politik" (*political actions*) yaitu kondisi seperti pembuatan Undang-Undang.

Dapat kita ambil kesimpulan sistem politik adalah kesatuan (kolektivitas) atau seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara. seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial, dengan mana nilai-nilai dialokasikan ke dalam masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai tersebut adalah merupakan sebuah kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah yang berasal dari input (*demand/support*) masyarakat

d) Lingkungan

Dalam teori sistem politik terdapat bagian yang disebut dengan lingkungan, lingkungan terdiri atas *intrasocietal* dan *extrasocietal*, lingkungan *intrasocietal* terdiri atas lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik tetapi masih di dalam masyarakat yang sama.

Lingkungan *intrasocietal* terdiri atas:

- *Lingkungan ekologis* (fisik, nonmanusia). Misal dari lingkungan ini adalah kondisi geografis wilayah yang didominasi misalnya oleh pegunungan, maritim, padang pasir, iklim tropis ataupun dingin;
- *Lingkungan biologis* (berhubungan dengan keturunan ras). Misal dari lingkungan ini adalah *semitic*, *teutonic*, *arianic*, mongoloid, skandinavia, anglo-saxon, melayu, austronesia, *caucassoid* dan sejenisnya;
- *Lingkungan psikologis*. Misal dari lingkungan ini adalah *postcolonial*, bekas penjajah, maju, berkembang, terbelakang, ataupun *superpower*; dan
- *Lingkungan sosial*. Misal dari lingkungan ini adalah budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan demografis.

Lingkungan *extrasocietal* adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada. Lingkungan *extrasocietal* terdiri atas:

- *Sistem Sosial Internasional*. Misal dari sistem sosial internasional adalah kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, atau

mudahnya apa yang kini dikenal dalam terminologi *International Regime* (rezim internasional) yang sangat banyak variannya.

- *Sistem ekologi internasional*. Misal dari sistem ekologi internasional adalah keterpisahan negara berdasar benua (amerika, eropa, asia, australia, afrika), kelangkaan sumber daya alam, geografi wilayah berdasar lautan (asia pasifik, atlantik), isu lingkungan seperti *global warming* atau berkurangnya hutan atau *paru-paru* dunia.
- *Sistem politik internasional*. Misal dari sistem politik internasional adalah PBB, NATO, ASEAN, ANZUS, *Europa Union*, kelompok negara-negara Asia Afrika, blok-blok perdagangan dan poros-poros politik khas dan menjadi fenomena di aneka belahan dunia. Termasuk ke dalam sistem politik internasional adalah pola-pola hubungan politik antar negara seperti hegemoni, polarisasi kekuatan, dan tata hubungan dalam lembaga-lembaga internasional.

Dua jenis lingkungan, *intrasocietal* dan *extrasocietal* mampu mempengaruhi mekanisme *input* (tuntutan dan dukungan) sehingga struktur proses dan *output* harus lincah dan peka dalam mengadaptasinya. Lingkungan itu sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar bagi terciptanya kerangka dan bentuk sebuah kebijakan.

➤ **Adaptasi Teori David Easton**

Setelah mengetahui makna asli dan penjelasan dari teori politik David Easton berdasarkan pada gambar 1.1 maka kita dapat masuk dan mulai mengadaptasikan teori tersebut dengan permasalahan yang diangkat yaitu batik

sebagai sarana diplomasi. Pertanyaan yang muncul pertama kali adalah bagaimana proses terjadinya kebijakan yang keluar dari pemerintah untuk merealisasikan tujuan diplomasi dengan sarana batik tersebut? Maka adaptasi dari teori sistem politik David Easton terhadap permasalahan yang diangkat dapat menjawabnya.

Akan tetapi diperlukan adanya penjelasan ulang terhadap pengertian dari istilah teoritis diatas, karena terjadinya perbedaan aplikasi dan permasalahan yang diangkat. Maka untuk mempermudah memahami topik permasalahan penulis mengurai ulang aplikasi dari istilah yang digunakan David Easton dengan disesuaikan dengan pembahasan masalah. Beberapa istilah tersebut antara lain adalah:

✓ **Input**

Berkaitan dengan pengertian dari teori sistem politik David Easton, maka terdapat *input* yang masuk ke sistem politik di Indonesia yang berupa dukungan terhadap batik itu sendiri, dukungan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari animo masyarakat. Contoh dari dukungan tersebut adalah, dukungan yang datang dari para budayawan, seniman, dan para cendikia. Kelompok tersebut mendukung usaha pemerintah karena kalangan tersebut pada dasarnya memahami sejarah dan arti makna dari pola dan corak batik itu sendiri yang amat melekat dan kental dengan budaya dan identitas bangsa Indonesia. Maka arti batik itu sendiri amat dekat dengan filosofi bangsa, nilai-nilai bangsa Indonesia yang melekat pada pola dan motif batik akan dijelaskan secara rinci dan detail pada bab berikutnya

Selanjutnya masih berhubungan dengan *input* atau dukungan, bila kita klasifikasikan secara rinci maka dukungan tersebut antara lain adalah:

- 1) Dukungan terhadap perkembangan batik Indonesia dikacah internasional untuk mencegah klaim atas budaya batik oleh negara lain.
- 2) Dukungan untuk mengembangkan industri batik lokal guna mengangkat taraf ekonomi masyarakat.
- 3) Dukungan terhadap pelestarian budaya Indonesia termasuk batik agar tidak dilupakan bagi masyarakat Indonesia.

Sedangkan bentuk dari sebuah tuntutan adalah adanya kelompok masyarakat pengrajin batik yang resah akan klaim yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia berhubungan dengan hak paten dan kewajiban membayar pajak yang akan berlaku bagi mereka para pengrajin dan pedagang batik di Indonesia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu bentuk sebuah tuntutan adalah berupa tuntutan komoditas atau pelayanan negara kepada rakyatnya. Dalam kasus batik itu sendiri, masyarakat dari kalangan pengrajin batik menuntut untuk diberikan hak komoditas dan pelayanan dalam memproduksi batik di Indonesia tanpa harus takut untuk kedepannya terancam membayar pajak pada negara lain seperti Malaysia apabila ternyata pemerintah gagal mengupayakan pengakuan batik sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO

Dalam ilustrasi model David Easton yang telah disesuaikan tersebut terdapat pula tuntutan dari berbagai aspek dan kalangan di Indonesia yang membuat pemerintah mengambil langkah maju. Setelah ditetapkannya batik sebagai warisan budaya tak benda bagi kebudayaan Indonesia maka pemerintah Indonesia harus membuat langkah yang lebih jauh lagi guna memanfaatkan momentum tersebut. Maka menjadikan batik sebagai sarana diplomasi budaya merupakan hal yang tepat yang harus dilakukan pemerintah Indonesia guna mendukung perkembangan Indonesia dalam bidang diplomasi dimata internasional.

Beberapa bentuk *demand* yang menuntut pemerintah melakukan hal lebih jauh terhadap batik antara lain adalah:

- 1) keharusan untuk segera mempromosikan batik keseluruh penjuru dunia dengan menjalin kerjasama/*partnership* dengan berbagai negara di seluruh dunia.
- 2) tuntutan untuk senantiasa mengembangkan batik seiring dengan berkembangnya zaman, globalisasi dan modernisasi yang kian mengikiskan nilai-nilai kebudayaan lokal dan nilai tradisional Indonesia.
- 3) adanya tuntutan untuk menjadikan batik sebagai sarana komoditi bagi negara Indonesia yang dapat memberikan sumbangan devisa negara bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hingga pada akhirnya pemerintah membuat sebuah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Hari Batik Nasional serta dilanjutkan dengan menggelar agenda *World Batik*

Summit (WBS) yang dapat memberikan nilai tambah bagi fungsi batik sebagai warisan budaya bangsa. Penjelasan detail tentang keputusan pemerintah ini dijabarkan pada bab III.

✓ **Output**

Selanjutnya kita masuk pada istilah *output*, berdasarkan pengertian *output* pada makna asli dari teori sistem politik, maka keputusan pemerintah (*output*) yang berhubungan dengan dukungan untuk perkembangan dan pelestarian batik itu sendiri mengalami dua tahapan yaitu

pertama, keputusan pemerintah dengan membuat undang-undang penetapan hari batik nasional yang terdapat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Hari Batik Nasional. Yang berisi tentang penetapan tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional pasca ditetapkannya batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia oleh UNESCO.

Kedua, adalah tindakan implementasi konkrit pemerintah terhadap keputusan tersebut yang berupa sebuah pelaksanaan *World Batik Summit* (WBS) yang didalamnya terdapat agenda-agenda yang merupakan implementasi konkrit pemerintah terhadap perkembangan dan kemajuan batik itu sendiri. Untuk penjelasan rinci bagaimana dan mengapa WBS diadakan sebagai sebuah wujud dari upaya pemerintah menjadikan batik sebagai sarana diplomasi negara, maka penulis akan

menjelaskan secara rinci pada halaman berikutnya yang dapat ditemukan pada konsep teori diplomasi kebudayaan.

✓ **Sistem politik**

Berkenaan dengan tema yang diangkat oleh penulis maka sistem politik yang mengatur urusan dalam permasalahan batik tersebut adalah pemerintah pusat sebagai otoritas utama dalam negara, pemerintah dapat direpresentasikan oleh lembaga pemerintahan seperti eksekutif dan legislatif. Selanjutnya kementerian yang ada kaitannya dengan batik dan mengatur permasalahan budaya seperti Kementerian Perdagangan, yang membidangi permasalahan perkembangan nilai ekspor batik ke dunia internasional, dan yang terakhir adalah Kementerian Kebudayaan, selaku otoritas yang mengatur dan melindungi serta mengorganisir aset budaya bangsa Indonesia.

Sistem politik dalam pengertian yang telah dijelaskan secara sekilas sebelumnya, adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara. seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial, dengan mana nilai-nilai dialokasikan ke dalam masyarakat secara otoritatif. Alokasi nilai tersebut adalah merupakan sebuah kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah yang merupakan masukan dari *demand* masyarakatnya pula.

Hasil dari sistem politik yang telah dirumuskan oleh aktor sistem politik tersebut adalah sebuah keputusan presiden tentang hari

batik dan Undang-Undang tentang batik. Hal tersebut guna memenuhi *support* dan *demand* yang berasal dari *input* masyarakat.

✓ Lingkungan

Dari pengertian lingkungan dalam teori awal jika dihubungkan dengan tema yang diangkat oleh penulis, maka lingkungan internasional memiliki andil yang besar dalam mempengaruhi keputusan pemerintah Indonesia dalam sistem politik guna mengeluarkan kebijakan batik.

Adanya klaim batik oleh negara lain mengindikasikan akan pentingnya promosi batik yang harus digalakkan secara gencar ke mancanegara, semua negara didunia merupakan entitas internasional yang harus mengenal batik Indonesia dan Indonesia sebagai pemilik budaya batik. Oleh karena itu maka *partnership* kepada negara lain mutlak diperlukan bagi Indonesia.

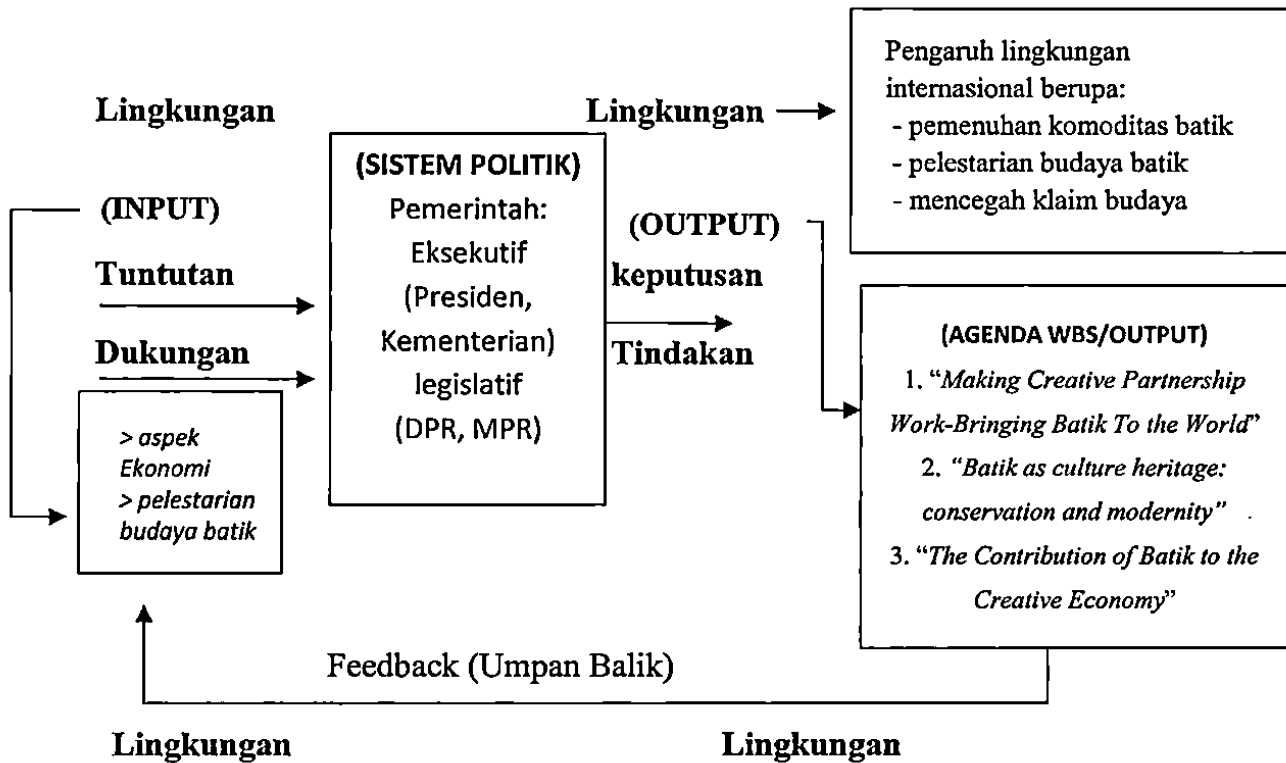
Selain itu juga pada era globalisasi saat ini budaya internasional dapat dengan mudah diserap oleh negara manapun, dengan melihat hal tersebut pula maka budaya batik perlu dilakukan konservasi atau pemeliharaan dengan pelestariannya keseluruhan lapisan masyarakat lokal maupun internasional. Hal tersebut diatas merupakan sebuah fakta akan pengaruh lingkungan internasional (*extrasocietal*) yang dijadikan acuan

utama bagi pemerintah guna memajukan kebijakan tentang batik

Mari kita perhatikan gambar 2.1 dibawah ini, penjelasan proses terjadinya pengambilan kebijakan dari pemerintah/output yang menelurkan agenda kerja pemerintah untuk mewujudkan pengembangan batik Indonesia.

Gambar 2.1

Penerapan Skema Kerja Sistem Politik Easton



Sumber: Ronald H. Chilcote¹⁵

Setelah melihat dari gambar 2.1 diatas, maka terjadi perubahan yang signifikan sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu batik itu sendiri, penyesuaian terhadap teori pun telah diadaptasikan berdasarkan proses yang terjadi dilapangan. Maka berdasarkan pada gambar yang telah diadopsi dari teori politik Easton diatas, secara ringkas kita telah memahami sedikit alur proses yang terjadi, bagaimana proses kebijakan terhadap batik terbentuk, pengajuan sebagai negara pemilik kebudayaan batik kepada

¹⁵ Ronald H. Chilcote, "The Easton Model of Political System: A Critique", *Journal of Public Administration*, 1971, pp. 1-11.

UNESCO, hingga pada akhirnya pemerintah menyelenggarakan WBS (*World Batik Summit*) dalam upaya mensukseskan batik sebagai instrumen diplomasi kebudayaan bagi Indonesia.

Langkah pertama pemerintah dalam realisasinya kearah diplomasi budaya dengan batik adalah World Batik Summit (WBS) dengan tema “Indonesia: *Global Home of Batik*”, WBS diadakan di Jakarta *Convention Center*, pada tanggal 28 September-2 Oktober 2011 lalu.¹⁶ Pada pertemuan akbar tersebut Indonesia seakan telah memproklamirkan kepada dunia bahwa batik adalah milik Indonesia, dan Indonesia adalah kampung halamannya batik dunia.

Pada dasarnya awal mula muncul pengambilan keputusan oleh pemerintah Indonesia untuk mengadakan *World batik Summit*, adalah terinspirasi dari adanya berbagai macam tuntutan dan dukungan dari masyarakat Indonesia seperti yang telah dijelaskan pada teori sistem politik (*political action*) pada halaman sebelumnya. Yaitu masyarakat Indonesia dari berbagai macam kelas dan taraf ekonomi serta pendidikan, menuntut sekaligus mendukung pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas terhadap perilaku klaim budaya yang dilakukan negara lain. Tindakan yang harus dilakukan tidak mesti dengan melakukan perang dengan negara yang bersangkutan tetapi dengan memanfaatkan budaya itu sendiri, maka pemerintah perlu melaksanakan sebuah tindakan yang jauh lebih realistis lagi. Agenda yang terdapat dalam WBS itu sendiri telah mencakupi beberapa tindakan

¹⁶ <http://tourismindonesiaonline.com/gipi-wadah-asosiasi-pariwisata-di-indonesia/detnews/488/world-batik-summit-upaya-mengukuhkan-batik-di-mata-dunia.html>

2) “Batik as Culture Heritage: Conservation and Modernity”

Batik sebagai warisan budaya dunia, adalah agenda selanjutnya yang dibahas dalam *World Batik Summit*, yang menekankan pada sebuah konservasi atau pemberdayaan dan *modernity* yang memperkaya batik seiring dengan perkembangan mode dan modernisasi dunia.

Hal ini diharapkan Indonesia dapat mengupayakan perkembangan batik secara domestik dan internasional berkaitan dengan perkembangan zaman yang kian maju. Dengan tidak mengabaikan esensi sejarah yang terdapat didalam batik tersebut. Hal yang membuat batik sebagai sebuah mahakarya yang tak ternilai adalah esensi warisan budaya (*heritage*) yang terdapat dibalik motif dan coraknya tersebut.

Disetiap sentuhan gambar pada motif batik terdapat nilai prasejarah sendiri bagi masyarakat Indonesia. Ada kalanya makna yang terkandung dalam sebuah pola batik menjadi bagian dari sejarah panjang raja-raja Jawa. Contohnya saja pola motif batik *Truntum*, yang diartikan sebagai “tumbuh kembali” yaitu tumbuh kembalinya cinta yang terjalin antara permaisuri Rara Beruk dengan Sri Susuhan Paku Bawana III Surakarta, yang pada saat itu sempat terjadi putus cinta antara keduanya. Batik truntum sendiri bercirikan sebuah motif bunga-bunga kecil bewarna terang pada dasar yang gelap¹⁷. Fakta tersebut menguatkan akan karakter yang dapat diandalkan bagi Indonesia untuk menyelaraskan antara perkembangan zaman yang modern dengan esensi historis dibalik kekayaan motif batik Indonesia.

¹⁷ Oetari Siswomihardjo-Prawirohardjo, *Pola Batik Klasik: Pesan Tersembunyi Yang Dilupakan*, Pustaka Pelajar, 2011, hal. 18

Sesuatu bentuk kekuatan budaya suatu bangsa harus mendapat dukungan yang penuh oleh setiap elemen yang terdapat pada negara itu sendiri, mulai dari pemerintah, pejabat daerah hingga ke masyarakatnya. Karena setiap kebudayaan adalah sebagai jalan atau arah didalam bertindak dan berfikir, sehubungan dengan pengalaman-pengalaman yang fundamental, dari sebab itulah kebudayaan tidak bisa melepaskan dari individu dan masyarakat¹⁸. Karena wujud sebuah kebudayaan salah satunya adalah, “wujud benda-benda hasil karya manusia”, wujud ini bersifat konkrit, nyata dan dapat diraba.

Tetapi disisi lain, nilai budaya yang juga disebut sebagai “wujud ide, gagasan, norma dan peraturan”, dan sekaligus sebagai “wujud kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat”¹⁹, ketiga nilai budaya tersebut semua terpadu dalam nilai batik itu sendiri yang dimana batik merupakan sebuah hasil karya bangsa yang *tangible* atau dapat dilihat secara nyata oleh manusia karena merupakan hasil karya seni, dan disisi lain batik pula memiliki nilai *intangibile* sendiri yaitu sebuah nilai pengejawantahan makna dibalik motif dan fungsi batik itu sendiri yang memiliki sejarah, arti budaya masyarakat Indonesia yang hanya bisa dimengerti dan dipahami dan tidak dapat dilihat.

3) “*The Contribution of Batik to the Creative Economy*”

Agenda terakhir yaitu, pemerintah berusaha menguatkan eksistensi batik terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. hal ini berkaitan dengan pengrajin-pengrajin batik di Indonesia yang mulai mendapatkan kembali pasarnya pasca ditetapkannya batik Indonesia sebagai warisan dunia,

¹⁸ Drs. H Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar (Mata Kuliah Dasar Umum)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. Hal. 54

¹⁹ Ibid., hal. 54

perkembangan pasar ini dapat dilihat dari perkembangan di sejumlah industri batik di Indonesia.

Peningkatan jumlah penjualan batik tersebut dapat dilihat dari data yang menunjukkan adanya statistik penjualan yang cenderung meningkat pasca pengukuhan batik oleh UNESCO tanggal 9 Oktober 2009 lalu. Berdasarkan data Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Yogyakarta, peningkatan penjualan batik di Yogyakarta pasca pengakuan UNESCO mencapai 30 persen. Ketua Dekranasda Kota Yogyakarta, Dyah Suminar, mengatakan bahwa pasca pengakuan tersebut, batik semakin diminati oleh banyak kalangan. Menurutnya, kerajinan batik di Yogyakarta sudah mulai berkembang secara positif. Jumlah pengrajin batik yang mencapai 272 unit sudah mampu mapan dan bisa memproduksi batik secara terus-menerus. Pengrajin batik di Yogyakarta juga terus berkembang. Tidak hanya kain batik, tetapi juga muncul kerajinan lain seperti sandal batik, sepatu batik, lukisan batik²⁰.

Telah dijabarkan penjelasan di atas dengan detail, namun bagaimanakah batik dapat menjadi *soft power* bagi Indonesia? hal ini merupakan sebuah pertanyaan kunci guna membuktikan efektifitas batik untuk menjadi sarana *soft power*.

Dalam prakteknya dilapangan pemerintah Indonesia mengupayakan batik untuk menjadi *icon* budaya batik dunia yang memiliki nilai budaya dan

²⁰ http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/09/12/05/03554_pasca_pengakuan

sejarah yang tinggi dengan mempromosikan batik melalui berbagai macam agenda yang telah dirumuskan.

Terjalannya kerjasama antar negara dan dunia internasional yang membahas tentang batik menjadikan Indonesia memiliki nilai positif yang lebih dimata dunia. Yang sudah pasti akan mempengaruhi berbagai macam kebijakan luar negeri dengan negara yang terjalin kerjasama budayanya. Hal tersebut akan lebih sukses lagi apabila agenda yang telah dirancang dalam *World Batik Summit* dapat dilaksanakan dengan konsisten dan massif oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memperkuat pengaruh budaya batik Indonesia di kancah internasional.

F. HIPOTESA

Dari kerangka teori yang ditelaah dijabarkan tersebut diatas maka penulis mencoba memulai penelitian dengan hipotesis sementara bahwa bentuk upaya pemerintah dalam menjadikan batik sebagai sarana *soft power* dan alat diplomasi kebudayaan adalah, pertemuan *World Batik Summit* yaitu:

- 1) “ *Making Creative Partnership Work- Bringing Batik to the World*”,
- 2) “ *Batik as Culture heritage : Conservation and Modernity*”
- 3) “ *The Contribution of Batik to The creative Economy*”.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Penelitian Kualitatif Deskriptif

Untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat maka penulis mencoba untuk menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Selaras dengan apa

yang diungkapkan oleh Sr. Lexi J. Moleong, M.A., yang menjelaskan bahwasannya sebuah data-data yang dikumpulkan yaitu berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka²¹

Karena menurut penulis bahwa sebuah analisi yang mengangkat masalah diplomasi kebudayaan akan lebih faktual bila di terapkan menggunakan metode kualitatif dari pada kuantitatif yang hanya berdasarkan pada angka-angka, sedangkan kualitatif menekankan pada esensi dari sebuah perspektif narasumber (individu maupun referensi buku yang terpecaya) hal tersebut akan lebih membuat analisis dan penelitian pada masalah yang diangkat memiliki keakuratan data yang jelas.

Meskipun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melampirkan data-data yang berupa angka apabila diperlukan untuk melengkapi kevalidan data yang dibutuhkan.

2. Penelitian kepustakaan (data sekunder)

Hal ini merupakan pengumpulan data yang bersumber dari buku dan referensi sumber tulisan, artikel, majalah, koran, dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam kasus yang berbeda tetapi memiliki sumber yang sama. penulis akan mencari data dan sumber yang bersumber dari internet dan situs resmi yang bersangkutan dengan instansi yang merupakan sumber data bagi masalah yang diangkat. Dalam hal ini situs resmi yang digunakan seperti, situs resmi UNESCO, situs resmi kementerian perindustrian dan kebudayaan.

²¹Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif (6th Edition). Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

H. JANGKAUAN PENELITIAN

Agar dapat memudahkan dalam menjawab pokok permasalahan dan untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih fokus maka penulis membatasi waktu penelitian yaitu: usaha yang dilakukan pemerintah pada tahun 2009 hingga saat ini (2012), penulis membatasi jangkauan penelitian mulai dari awalnya permasalahan ini muncul pertama kali yaitu pada tahun 2009 (Indonesia ditetapkan sebagai negara pemilik kebudayaan batik) hingga tahun 2012. Jadi batasan permasalahan yang akan dikupas tuntas dalam skripsi ini adalah seputar yang terjadi antara tahun 2008 hingga tahun 2012 saja.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan

Bahan pada bab pertama ini difokuskan untuk alasan penulis memilih judul, latar belakang masalah, tujuan penulisan, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Sejarah Batik dan Perkembangannya ke Dunia Internasional

Pembahasan difokuskan pada sejarah pertama kali lahirnya batik Indonesia, perkembangan batik ke dunia internasional hingga penetapan batik oleh UNESCO sebagai warisan budaya bangsa

BAB III : Mekanisme Pembuatan

Batik yang telah memiliki penggemar diseluruh penjuru dunia ternyata tidak hanya sebatas produk komoditi semata, oleh karena itu dalam bab ini penulis memfokuskan pada masalah potensi besar yang terdapat dibalik budaya batik itu sendiri. Dan pengaruhnya terhadap hubungan internasional bagi Indonesia.

BAB IV : Upaya Pemerintah Dalam Menjadikan Batik Sebagai Sarana Diplomasi & Soft Power Bagi Indonesia Dikancah Internasional Pasca Ditetapkannya Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa Pada 2 Oktober 2009

Pada bab ini penulis memfokuskan hasil analisis dari upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjadikan batik sebagai instrumen diplomasi bagi Indonesia. Yaitu: *“Batik as Culture Heritage: Conservation and Modernity”*, *“Making Creative Partnership Work-Bringing Batik To the World”*, *“The Contribution of Batik to the Creative Economy”*

BAB V : Kesimpulan

Bahasan pada bab ini adalah hasil penelitian yang berujung pada kesimpulan akhir pada penulisa skripsi. Yang merangkum secara padat poin penting dari skripsi.